

BAB II

PROFIL HANSIP

2.1 Sejarah dan Perkembangan Hansip

Pertahanan Sipil yang biasa disingkat menjadi Hansip merupakan organisasi yang menampung partisipasi rakyat dalam pelaksanaan mempertahankan keberlangsungan keamanan negara. Rakyat memberikan potensi yang sangat penting sebagai pangkal dari pertahanan dan keamanan dengan sistem pertahanan sipil. Organisasi pertahanan sipil mempunyai sejarah panjang dan tidak lepas dari partisipasi rakyat dalam usaha pembelaan negara berikut sejarah dan perkembangan organisasi Pertahanan Sipil (Hansip) dari masa ke masa antara lain:

2.1.1 Masa Kolonialisme Belanda

Pada masa penjajahan kolonial kesadaran rakyat dalam upaya mempertahankan keamanan negara telah tertanam dengan memupuk kesadaran dan memelihara semangat untuk melakukan perjuangan dan perlawanan terhadap penjajah. Upaya perjuangan rakyat dalam membebaskan diri dari belenggu penjajahan dilandasi dengan jiwa keprajuritan. Pada masa pergerakan nasional membawa pengaruh untuk rakyat dalam pembelaan negara. Hal tersebut dilihat ketika para pemuda Indonesia masuk dalam keanggotaan Angkatan Perang Belanda yaitu KNIL (*Koninklijke Nederlands Indische Leger*). Terdapat dualisme pemikiran terhadap pemuda Indonesia yang menjadi bagian anggota dari KNIL tersebut. KNIL dianggap sebagai pasukan penindas pribumi sehingga

pemuda Indonesia yang menjadi anggotanya dapat dikatakan sebagai pengkhianat bangsa. Dilain pihak terdapat kesadaran juga bahwa jika masuk KNIL dapat mengasah skill kprajuritan modern yang berguna untuk mengisi kemerdekaan nasional¹.

Hakikatnya KNIL dibentuk oleh Belanda bukan untuk mengantisipasi serangan dari luar melainkan mengantisipasi serangan yang berasal dari dalam negeri. Sehingga pada Perang Dunia I tercetus rencana untuk memperkuat angkatan militer Belanda di Indonesia dengan mengadakan wajib militer untuk pribumi. Namun setelah dipikirkan lebih lanjut hal tersebut dapat menjadi boomerang bagi Belanda itu sendiri. Sehingga Belanda memikirkan cara untuk mengikutsertakan rakyat Indonesia dalam menjaga pertahanan dan keamanan Belanda di Indonesia tanpa membahayakan kedudukan kekuasaannya. Dengan begitu dibentuklah berbagai golongan untuk pelaksanaan tugas militer yang tidak terjun dalam pertempuran. Dibentuknya berbagai golongan itu dimaksud agar tidak memunculkan kekuatan yang kompak.

Pada perkembangannya akhirnya Belanda memutuskan membentuk organisasi semacam pertahanan sipil yang bernama LBD (*Luch Bescherming Dients*) atau Perlindungan Pemecah Udara². Tugas dari LBD adalah untuk melindungi masyarakat dari serangan udara musuh, anggotanya merupakan warga masyarakat Indonesia non militer yang ikut secara sukarela. Kegiatannya

¹ Tim Penerbit Buku Dasawarsa Organisasi Hansip/Wanra. *Partisipasi Rakyat Dalam Usaha Pembelaan Negara*. Jakarta: Puswankamra, 1972, hlm. 9.

²Nanda Ridzki Gumelar. *Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Dalam Perlindungan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Di Kabupaten Sleman*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, hlm. 15.

meliputi, penerangan masyarakat, pemberitaan adanya serangan udara dari musuh, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya.³

Luch Bescherming Dients diatur oleh peraturan (*Staats Ordonantie*) dalam Berita Negara (*Staatblad*) tahun 1939 No. 581⁴. Organisasi ini dibentuk mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah yang diurus oleh pejabat-pejabat Pemerintah Sipil. Kegiatan yang dilakukan oleh LBD ini hanya dapat dilihat di kota-kota saja yang dilakukan dengan dinas-dinas yang bersangkutan. Upaya lain dari pemerintahan Belanda untuk mempertahankan kota dari cengkaman musuh adalah mengadakan program pelatihan warga sipil untuk menjadi penjaga kota (*Stadswacht*) yang menawarkan diri secara sukarela. Dengan demikian hal tersebut merupakan bentuk mobilisasi warga sipil yang pertama dalam rangka upaya menjaga kota-kota di Indonesia.

Pada kenyataannya upaya Belanda dalam menjaga pertahanan dengan penjagaan kota tersebut dilaksanakan secara ragu-ragu dan lagi organisasi LBD hanya dilaksanakan di kota-kota yang penduduknya berasal dari bangsa Belanda serta bangsa Eropa lainnya⁵. Hal tersebut membuat rakyat pribumi menganggap bukan untuk menyelamatkan dan melindungi rakyat melainkan untuk kepentingan pemerintah Kolonial Belanda saja terutama dalam menegakkan kekuasaannya. Akibatnya upaya-upaya tersebut kurang mendapatkan dukungan dari rakyat pribumi. Dengan begitu Jepang yang saat itu merupakan musuh Belanda dengan

³ Hamudy. *op. cit*, hlm. 262.

⁴ Chrystiana Agustin. *Op. cit*, hlm. 931.

⁵ Tim Penerbit Buku Dasawarsa Organisasi Hansip/Wanra. *op. cit*, hlm. 11.

mudah masuk dan menguasai Indonesia tanpa perlawanan yang berarti dari Belanda.

2.1.2 Masa Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang pertahanan sipil dan pengerahan rakyat dalam pertahanan dan keamanan memiliki perbedaan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Jepang yang mendarat di Indonesia disambut oleh tangan terbuka oleh rakyat Indonesia karena datang dengan propagandanya bahwa Jepang akan membantu Indonesia keluar dari kesengsaraan penjajahan.

Hakikatnya penjajahan Jepang sama saja dengan penjajahan yang dilakukan oleh Kolonial Belanda. Jepang datang ke Indonesia bertujuan untuk memobilisasi warga Sipil yang khususnya pemuda untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik⁶. Dalam rangka memperkuat pertahanannya untuk melawan pasukan sekutu, Jepang mengobarkan semangat keprajuritan dan kebangsaan Indonesia dengan mengadakan latihan kemiliteran dikalangan rakyat Indonesia. Latihan tersebut diadakan mulai dari sekolah, perkantoran, sampai ke pelosok pedesaan. Dari sini mulai terbentuknya barisan organisasi dalam rangka pertahanan dan keamanan yang beranggotakan bukan hanya kalangan militer namun berasal pula dari kalangan masyarakat sipil. Barisan-barisan organisasi semi militer tersebut seperti *Seinendan* (Barisan Pemuda) yang berusia antara 14-25 tahun,

⁶ Chrystiana, *loc. cit.*

Keibodan (Satuan Keamanan) untuk membantu polisi yang terdiri pemuda berumur 25-35.⁷

Disamping organisasi semi militer, Jepang juga membuat organisasi yang bersifat militer penuh. Organisasi tersebut antara lain, *Heiho* atau Pasukan Pembantu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Polisi Militer milik Jepang anggotanya adalah pemuda Indonesia dan sebagian dari mereka diambil dari tawanan KNIL. Selanjutnya pemerintah Jepang membentuk organisasi PETA (Pembela Tanah Air) di daerah Jawa dan Sumatera guna untuk membatu Resimen Jepang dalam pertahanan daerah yang ditugasi⁸. Adapun oragisasi lain yang dibentuk Jepang yaitu *Jawa Hokokai* untuk menyiarkan propaganda dan melalukan Latihan gerilya⁹. Selain organisasi yang anggotanya pria, terdapat organisasi yang anggotanya Wanita yaitu *Fujinkai* yang tugasnya membangun fasilitas kesehatan dan Pendidikan, serta menggalakan berkebun yang hasilnya dipakai untuk membuat pakaian¹⁰.

Pembentukan organisasi pertahanan sipil yang dibentuk oleh Jepang lebih sempurna dari pada yang dibentuk pada saat pemerintahan Kolonial Belanda. Pemerintah Jepang melakukan pengerahan rakyat secara total. Tak tanggung-tanggung organisasi pertahanan sipil dibentuk sampai pada lingkungan masyarakat terkecil yaitu *Gumi* yang sekarang dikenal Rukun Tetangga¹¹. *Gumi* ini merupakan suatu konsep yang dilakukan pemerintah

⁷ Ricklefs. *op. cit*, hlm. 431-432.

⁸ Tim Penerbit Buku Dasawarsa Organisasi Hansip/Wanra. *op. cit*, hlm. 12-13

⁹ Ricklefs. *op. cit*, hlm 439

¹⁰ Marwati Djoened Poesponegoro And Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011, hlm 36.

¹¹ Hamudy. *loc cit*.

Jepang untuk memasukan pemerintahan pusat ke pedalaman atau pedesaan yang diterapkan di pedesaan maupun perkotaan. Dari konsep tersebut juga membawa manfaat bagi rakyat pribumi yaitu menumbukan solidaritas di antara rakyat pribumi yang timbul karena sering mengadakan pertemuan membahas berita peraturan pemerintah.

Dalam sistim pertahanan Jepang organisasi pertahanan sipil disiapkan dalam susunan kelompok yang bernama *Gumi* yang tugasnya sama seperti LBD pada masa Belanda yang dibentuk untuk membuat pertahanan dan keamanan serta melindungi masyarakat dari gangguan musuh¹². Tugasnya pun seperti penjagaan keamanan, pengumpulan dana, pengaturan distribusi pangan, dan lainnya. Maka dari itu pertahanan sipil yang dibentuk oleh Jepang menjadi embrio dari pembentukan Hansip.

Upaya Jepang dalam mengerahkan rakyat dalam pertahanan dan keamanan membawa manfaat dan lebih menguntungkan daripada saat pemerintahan Kolonial Belanda. Saat kubu Indonesia dan Jepang sudah berbeda kepentingan terjadi pemberontakan-pemberontakan yang dipelopori oleh organisasi PETA sehingga dapat dikatakan upaya yang dilakukan Jepang ini ibarat senjata makan tuan.

2.1.3 Masa Perang Kemerdekaan

Perang kemerdekaan telah jauh dilakukan sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Hal tersebut dilakukan rakyat dengan

¹² Tim Penerbit Buku 20 Tahun Pertahanan Sipil. *20 Tahun Pertahanan Sipil;Partisipasi Rakyat Jawa Barat Dalam Pembelaan Negara*. Bandung: Mawil Pertahanan Sipil VIII Jawa Barat, 1982, hlm. 9.

tujuan untuk mengusir para penjajah dan membebaskan diri dari kesengsaraan tekanan penjajahan. Namun, perang atas nama kemerdekaan ini masih berlanjut meskipun kependudukan Jepang telah berakhir.

Pada bulan September sampai Oktober 1945 pasukan sekutu mendarat di Medan, Padang, Palembang, Semarang, dan Surabaya, yang bertujuan untuk melucuti tantara Jepang. Namun secara diam-diam mereka mempunyai tujuan lain yaitu ingin datang kembali untuk menjajah¹³. Kedatangan pasukan sekutu tersebut membuat amarah rakyat berkejolak sehingga terjadi ketegangan di daerah Jawa dan Sumatera yang menimbulkan peperangan antara rakyat dan pihak sekutu. Peperangan melawan sekutu ini banyak mengalami kekakalan karena perbedaan persenjataan yang digunakan oleh pihak sekutu dan pejuang Indonesia selain itu sistem pertahanan yang diterapkan oleh pihak Indonesia mudah terbaca oleh sekutu. Namun para pejuang Indonesia tidak pantang menyerah sekalipun harus dibayar dengan perjuangan dan pengorbanan.

Berdasarkan peristiwa perlawanan yang terjadi pada masa lampau, rakyat sadar untuk mengubah sistem pertahanan linier menjadi sistem pertahanan "*wehr Kriess*" atau sistem pertahanan perlawanan wilayah¹⁴. Sadar akan pentingnya garis pertahanan belakang untuk membantu memperkuat pertahanan garis depan, dalam masa peperangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara garis pertahanan depan

¹³ Ricklefs. *op. cit*, hlm. 454-455.

¹⁴ Tim Penerbit Buku Dasawarsa Organisasi Hansip/Wanra. *Op. cit*, hlm. 24.

dengan garis pertahanan belakang saling bersinergitas untuk mensukseskan peperangan melawan pihak sekutu.

Garis pertahanan belakang ini terdiri dari rakyat sipil yang menyumbangkan tenaga dan pikiran sesuai dengan kemampuannya. Kegiatan yang mereka lakukan antara lain adalah membantu dalam persediaan logistik dan menjadi tenaga kesehatan di lapangan.

Untuk mempermudah sistem pertahanan tersebut rakyat dihimpun dalam satuan yang bernama “Pager Desa” singkatan dari pasukan Gerilya Desa¹⁵. Pager Desa ini melakukan tugas dalam perlawanan rakyat dengan ikut serta membantu operasi-operasi militer. Meskipun dalam kenyataannya belum terbentuk organisasi pertahanan sipil yang baik, dengan seiring berjalannya waktu garis pertahanan belakang menyelaraskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh garis pertahanan depan. Partisipasi rakyat sipil dalam usaha pembelaan negara ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan keikut sertaannya negara Indonesia kembali berdiri dengan kokoh dan terlihat di mata Internasional.

2.1.4 Masa Revolusi

Berakhirnya perang kemerdekaan tidak membuat rakyat merasa aman dan tentram, rakyat Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Acaman dari luar dan dalam negeri datang silih berganti maupun secara bersama. Kondisi Indonesia pada masa ini dihiasi dengan pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh

¹⁵ *ibid.*

sekompok orang yang bertentangan dengan pemerintahan Indonesia, pemberontakan yang dihasut oleh penjajah, dan pemberontakan akibat terjadinya daerah yang dimanfaatkan oleh kekuatan asing. Pemberontakan tersebut seperti Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), RMS (Republik Maluku Selatan), DI TII, dan yang lainnya¹⁶.

Situasi yang gawat terhadap pertahanan dan keamanan negara Indonesia ini membuat timbulnya spontanitas dari rakyat terutama di daerah pecahnya pemberontakan, secara sukarela mereka membantu pemerintah dalam mengatasi gangguan keamanan yang menerpa daerahnya. Dengan pengalaman pada saat kemerdekaan rakyat bangkit dengan kekuatan-kekuatan dalam bentuk sebuah organisasi keamanan yang bernama OKD (Organisasi Keamanan Desa), OPR (Organisasi Perlawanan Daerah)¹⁷. Dengan sistem organisasi keamanan tersebut dapat terorganisir dengan baik tugas dalam membantu ABRI dalam melakukan operasi-operasi militer dalam penumpasan pemberontakan. Adapun kegiatan dari organisasi keamanan yang dibentuk adalah untuk penjagaan keamanan lingkungan, mengabarkan situasi daerah yang terkena dampak dari pemberontakan, membantu pengungsian, membantu kelangsungan produksi pangan, dan lainnya.

Pemulihan negara terhadap kondisi pertahanan dan keamanan akibat dari pemberontakan dapat diselesaikan, masalah pemerintah yang kemudian

¹⁶ Poesponegoro and Notosusanto. *op. cit*, hlm. 303

¹⁷ Tim Penerbit Buku 20 Tahun Pertahanan Sipil. *op. ci*, hlm. 20.

menanti adalah penyelesaian masalah Irian Barat yang masih dijajah oleh Belanda. Karena Konferensi Meja Bundar mengalami kegagalan, membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas yaitu membebaskan Irian Barat dengan cara kekerasan dengan dukungan Tri Komando Rakyat pada tahun 1961¹⁸. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bukan hanya mempersiapkan garis pertahanan depan saja. Melainkan pemerintah harus memperkuat garis pertahanan belakang juga dengan menggerakkan masyarakat sipil untuk membantu menjaga keamanan dari serangan musuh. Antusiasme dan partisipasi rakyat sangat besar untuk membela negaranya.

Keinginan rakyat yang besar untuk menunjukkan upaya mempertahankan keberlangsungan keamanan negara memerlukan alat untuk mengatur dan mengarahkan keberlangsungan kegiatan tersebut. Pembentukan organisasi Pertahanan Sipil ditandai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 48 Tahun 1962 Tentang Pembentukan Organisasi Pertahanan Sipil dalam Rangka Usaha Mempertinggi serta Menggalang Kewaspadaan Nasional. Adanya landasan hukum tersebut memperkuat wadah partisipasi rakyat.

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 48 Tahun 1962, Departemen Pertahanan/Keamanan yang ditunjuk sebagai pembina organisasi Pertahanan Sipil mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan No. MI/A/72/1962 pada tanggal 19

¹⁸ Arsip Nasional Republik Indonesia. *Arsip Nasional RI | Guide Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat 1949-1969*.

April 1962 yang menjadi tanggal bersejarah lahirnya Hansip di Indonesia.¹⁹ Sejalan dengan keadaan pertahanan keamanan Indonesia yang telah membaik pemerintah mengadakan refungsionalisasi aparat pemerintah, maka dari itu presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 dan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 yang berisi pelimpahan pembinaan organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan dan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri.²⁰

2.2 Fungsi dan Tugas Pokok Hansip

Pertahanan sipil merupakan sebuah organisasi yang memiliki fungsi, tujuan, dan tugas pokok. Sejak awal pembentukan, organisasi Pertahanan Sipil bertujuan sebagai pertahanan garis belakang dan pelindung untuk masyarakat dari gangguan keamanan. Organisasi Pertahanan Sipil disahkan pada tahun 1962, pada saat itu keadaan negara Indonesia sedang mengalami guncangan keamanan nasional. Dalam undang-undang Republik Indonesia No.14 Tahun 1962, fungsi dan tujuan Organisasi Pertahanan Sipil adalah sebagai alat mobilisasi dan pengerahan rakyat untuk menggalang kewaspadaan nasional dalam rangka pertahanan dan keamanan dengan mengikut sertakan rakyat dalam perlawanan nasional serta melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka pertahanan sipil²¹. Selama satu dekade organisasi pertahanan sipil berdiri dibawah naungan Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan memusatkan perhatian dengan tujuan untuk membantu angkatan bersenjata republik Indonesia sebagai pasukan

¹⁹ Hamudy. *loc. cit.*

²⁰ Chrystiana Agustin. *op. cit*, hlm. 930.

²¹ Tim Penerbit Buku Dasawarsa Organisasi Hansip/Wanra. *Op. cit*, hlm. 49-50.

cadangan dengan tujuan pokok merencanakan, mempersiapkan, Menyusun seluruh potensi nasional yang dimiliki negara Indonesia untuk memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Namun, dalam pembentukannya organisasi pertahanan sipil tetap berfungsi sebagai pelindung masyarakat.

Pada tahun 1972, keluar keputusan presiden No.55 Tahun 1972 yang membahas tentang penyempurnaan organisasi pertahanan sipil dan perlawanan rakyat dalam rangka penertiban pelaksanaan sistim HANKAMRATA (Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta). Dengan keluarnya keputusan tersebut mengubah fungsi dan tujuan dari pembentukan organisasi pertahanan sipil pada awal dibentuk sebagai pasukan cadangan untuk bertempur menjadi organisasi yang bergulat dalam bidang kemanusiaan²².

Organisasi pertahanan sipil menurut Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1972 memusatkan perhatian pada perlindungan masyarakat akibat dari bencana yang datang dari alam maupun manusia. Keberadaan Hansip yang mempunyai fungsi "Perlindungan Masyarakat" diperkuat oleh diterbitkannya landasan hukum dalam UU Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perintahan Keamanan Negara Republik Indonesia²³, sebagai komponen pertahanan dan keamanan dalam mensukseskan sistim HANKAMRATA yang dibina dibawah naungan Departemen Dalam Negeri.

²² Chrystiana Agustin. *op. cit*, hlm 932.

²³ Undang-undang Republik Indonesia. *Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia*. 1982.

2.3 Susunan Organisasi Hansip

Organisasi Pertahanan Sipil merupakan sebuah organisasi yang terstruktur. Setelah disahkannya Hansip sebagai sebuah organisasi, Departemen Pertahanan Keamanan mengeluarkan keputusan sebagai alat yang mengatur tata kerja Organisasi Pertahanan Sipil untuk mencapai tujuan secara terstruktur. Pada saat Pertahanan Sipil berada dibawah naungan Departemen Pertahanan Keamanan Organisasi Pertahanan Sipil disusun dari pusat sampai daerah dan susunannya terdiri dari Markas-markas Hansip dan Kesatuan-kesatuan Hansip²⁴. Untuk penyusunan Markas-markas Hansip disusun berdasarkan tingkatan dari pembagian administrasi pemerintah dan kevitatan suatu daerah atau proyek kebijaksanaan pertahanan.

Susunan Markas-markas Hansip berdasarkan pembagian administrasi terdiri dari Markas Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, Markas Daerah yang meliputi Daerah Tingkat I, Markas Resor yang meliputi Daerah Tingkat II, Markas Sektor yang meliputi wilayah kecamatan, Markas Datasemen yang meliputi wilayah Desa atau Kelurahan yang mengkoordinir pos-pos kesatuan Hansip. Sedangkan untuk susunan Hansip berdasarkan proyek vital yang dilihat dari segi pertahanan keamanan dibentuk Markas Distrik Hansip meliputi wilayah daerah proyek yang bersangkutan. Untuk penyusunan Sat Hansip atau kesatuan-kesatuan Hansip disusun berdasarkan keperluannya seperti untuk keamanan, pemberitaan, evakuasi dan lain sebagainya. Untuk susunan organisasi dari setiap markas-markas Hansip dibawah pembinaan Departemen Pertahanan dan

²⁴ Tim Penerbit Buku 20 Tahun Pertahanan Sipil. *op. cit*, hlm. 68.

Keamanan negara Indonesia diatur dalam Keputusan MENHANKAM/PANGAB Nomor. KEP/A/323/1967 dapat dilihat sebagai berikut:

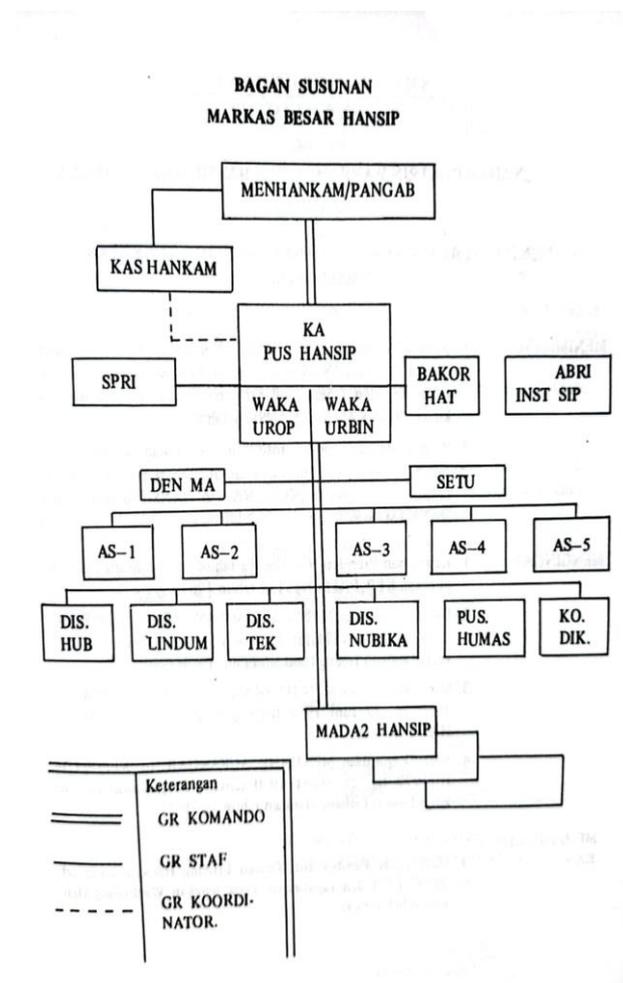
a. Susunan Markas Besar Hansip atau Markas Pusat Hansip

Markas Pusat Hansip merupakan badan utama di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan yang melakukan penentuan kebijaksanaan dan pengendalian atas pembinaan organisasi Hansip diseluruh Indonesia. Markas Pusat Hansip dipimpin oleh Kepala Pusat Hansip yang berasal dari kalangan ABRI dengan pangkat Perwira Tinggi yang kedudukannya sebagai penasehat serta pembantu utama Menteri Pertahanan Keamanan. Kepala Pusat Hansip dibantu oleh:

1. Wakil Kepala yang terdiri dari dua bagian yaitu Wakil Kepala Urusan Operasi (WAKA UROP) dan Wakil Kepala Urusan Pembinaan (WAKA URBIN) berfungsi sebagai penasehat dan pembantu utama Kepala untuk mengadakan koordinasi Staf.
2. Staf Umum yang merupakan para Asisten Kepala (AS-KA) disusun dalam bidang-bidang tugas seperti untuk penelitian, perencanaan, pengembangan masalah keamanan serta perencanaan operasi organisasi dan Pendidikan/Latihan.
3. Staf Khusus yang terdiri dari badan-badan pelaksana seperti: Dinas Perhubungan (DISHUB), Dinas Perlindungan Umum (DISLINDUM), Dinas Teknik (DISTEK), Dinas Perlindungan NUBIKA (DISLINUBIKA), Pusat Hubungan Masyarakat (PUSHUBMAS), Komando Pendidikan (KODIK)

4. Badan Khusus sebagai aparat pelayanan dan pelaksana seperti Badan Koordinasi atau Penasehat yang terdiri dari wakil-wakil ABRI/Departemen/Instansi Sipil sebagai aparat pembantu utama. Dalam Badan Pelayanan terdiri atas Sekretariat Umum (SETU) dan Datasemen Markas (DENMA) untuk membantu staf dalam pelayanan tata laksana/kantor, perawatan dan perbekalan.

Berikut bagan susunan dari Markas Besar Hansip :



Bagan 1. Susunan MAPUSHANSIP
(Sumber : Partisipasi Rakyat Dalam Usaha Pembelaan
Negara, 1972)

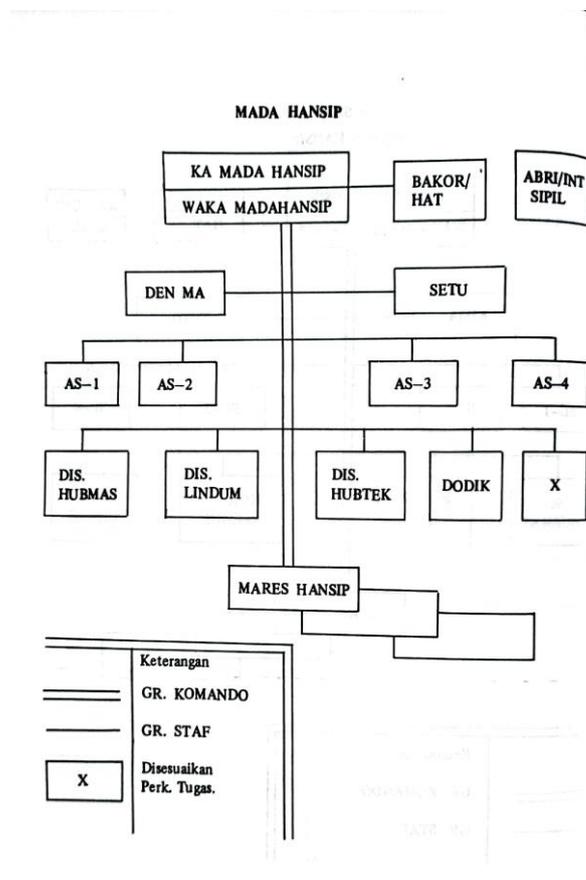
b. Markas Daerah Hansip

Markas Daerah Hansip merupakan bagian vertikal setelah Markas Pusat Hansip sebagai penyelenggara pembinaan, penyusunan, dan pengerahan potensi Pertahanan Sipil di Daerah Tingkat I. Markas daerah dipimpin oleh Kepala yang menjabat sebagai Gubernur. Pada pelaksanaan tugas sehari-harinya Kepala Markas Daerah Hansip dibantu oleh staf-staf Markas Daerah Hansip yang dipimpin oleh Kepala Staf. yang sekaligus merupakan wakil Kepala Markas Daerah Hansip. Berikut penyelenggara tugas di Markas Daerah Hansip :

1. Kepala Staf atau Wakil Kepala yang berasal dari kalangan ABRI berpangkat Perwira Menengah.
2. Staf Umum yang terdiri dari para Asisten Kepala (AS-KA) yang disusun dalam bidang-bidang: AS1-KA bertugas dalam penelitian, pengembangan, perencanaan kegiatan Hansip. AS2-KA bertugas dalam operasi, organisasi, dan Pendidikan/Latihan. AS3-KA sebagai pembinaan logistic/materil personil dan kesejahteraan moril. AS4-KA sebagai pembinaan logistik/materil dan pembiayaan perbendaharaan.
3. Staf Khusus yang terdiri dari Dinas hubungan Masyarakat/Penerangan, Dinas Perlindungan Umum, Dinas Perhubungan Teknik, Depot Pendidikan
4. Sekretariat dan Datasemen Markas yang merupakan Badan Pelayanan Staf

5. Badan Koordinasi/Penasehat bertugas dalam memberikan saran, usul, pertimbangan-pertimbangan dalam upaya peningkatan daya guna organisasi Hansip.

Untuk lebih memperjelas mengenai susunan organisasi Markas Daerah Hansip, berikut bagan susunan dari Markas Daerah Hansip :



Bagan 2. Susunan MADAHANSIP
(Sumber : Partisipasi Rakyat Dalam Usaha Pembelaan Negara, 1972)

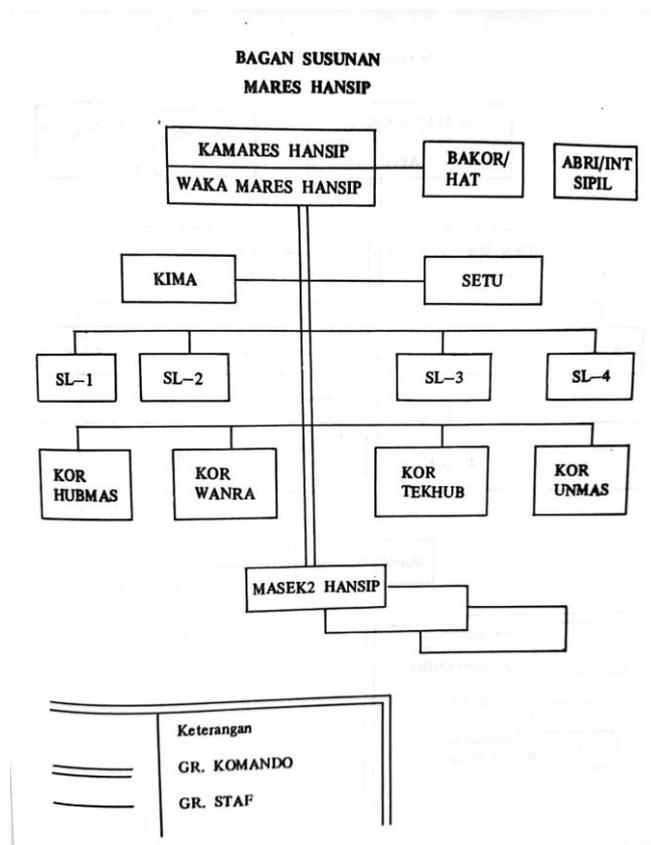
c. Markas Resor Hansip

Markas Resor Hansip merupakan bagian dari komando vertikal Markas Daerah Hansip yang menyelenggarakan pembinaan, penyusunan serta pengerahan potensi Pertahanan Sipil di Daerah Tingkat II. Markas Resor

Hansip dipimpin oleh seorang Kepala yang menjabat sebagai Bupati/Walikota. Dalam menjalankan tugas sehari-harinya Kepala Markas Resor Hansip dibantu staf-staf Markas Resor Hansip yang dipimpin oleh Kepala staf sekaligus wakil Kepala Markas Resor Hansip. Berikut penyelenggara tugas di Markas Resor Hansip :

1. Kepala Staff atau Wakil Kepala Markas Resor yang berasal dari kalangan Abri berpangkat Perwira Menengah/Pertama
2. Si-1 urusan penelitian, pengembangan perencanaan. Si-2 urusan operasi, organisasi, Pendidikan/pelatihan. Si-3 urusan pembinaan tenaga manusia. Si-4 urusan logistik pembiayaan, perbendaharaan.
3. Biro Humas/Penerangan
4. Koordinator-koordinator Teknis seperti Koordinator Perlawanan Rakyat (KORWANRA), Koordinator Perlindungan Masyarakat (KORLINMAS), Koordinator Teknik dan Perhubungan (KORTEKHUB)
5. Sekretariat (SETU) bertugas dalam menyelenggarakan administrasi umum
6. Kompi Markas (KIMA) bertugas dalam menyelenggarakan pelayanan staf dan perawatan staf
7. Badan Koordinasi/Penasehat bertugas dalam membantu pimpinan Markas Resor Hansip dalam perencanaan umum, penentuan kebijaksanaan, dan pelaksanaan fungsi dalam peningkatan Pertahanan Sipil.

Untuk lebih memperjelas mengenai susunan organisasi Markas Resor Hansip, berikut bagan susunan dari Markas Resor Hansip :



Bagan 3. Susunan MARESHANSIP
(Sumber : Partisipasi Rakyat Dalam Usaha Pembelaan
Negara, 1972)

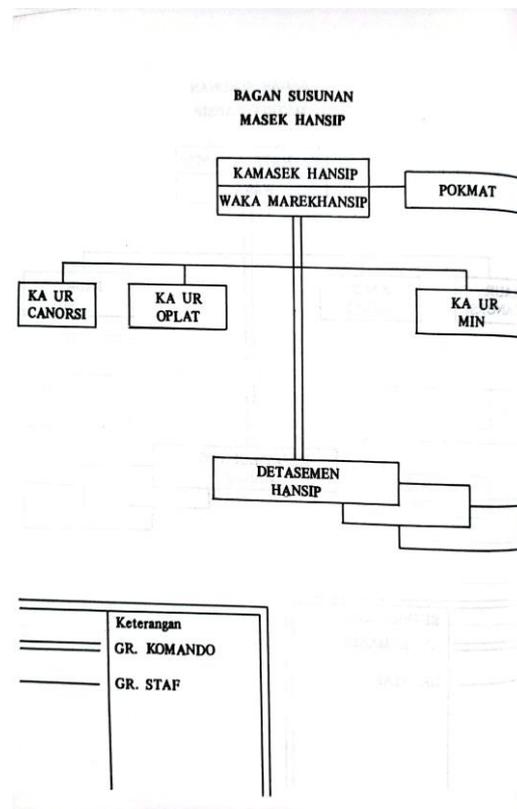
d. Markas Sektor Hansip

Markas Sektor Hansip merupakan bagian vertikal komando dari Markas Resor Hansip yang melaksanakan pembinaan, penyusunan, serta pengerahan potensi Pertahanan Sipil di daerah Kecamatan. Markas Sektor dipimpin oleh seorang Kepala yang menjabat sebagai Camat. Pada pelaksanaan tugasnya Kepala Markas Sektor dibantu oleh staf-staf Markas Sektor Hansip yang

dipimpin oleh Wakil Kepala Markas Sektor Hansip. Berikut penyelenggara tugas di Markas Sektor Hansip :

1. Wakil Kepala yang dijabat Pati Abri tugasnya yaitu membantu dan penasehat utama dari Kepala Markas Sektor.
2. Urusan Perencanaan dan Organisasi (KAUCARNOSI), tugasnya mengumpulkan serta menyiapkan rencana kegiatan Hansip di daerahnya, menyiapkan rencana penyusunan tugas dalam rangka fungsi Hansip seta pengerahannya, menyiapkan penyempurnaan atau pengembangan Hansip didaerahnya dan menyusun laporan perkembangan.
3. Urusan Operasi/Latihan (KAUROPLAT), tugasnya adalah mengumpulkan dan merencanakan operasi penanggulangan bencana, menghimpun satuan gerak cepat jika sewaktu-waktu digunakan, memelihara kesiapsiagaan, menyusun dokumentasi kegiatan.
4. Urusan Administrasi (KAURMIN), tugasnya menyelenggarakan pekerjaan administrasi dan tata usaha Staf Markas Resor Hansip
5. Kelompok Penasehat tugasnya membantu Kepala Sektor dalam mengadakan perencanaan umum bagi penyelenggaraan fungsi Pertahanan Sipil di daerahnya.

Untuk lebih memperjelas mengenai susunan organisasi Markas Sektor Hansip, berikut bagan susunan dari Markas Sektor Hansip :



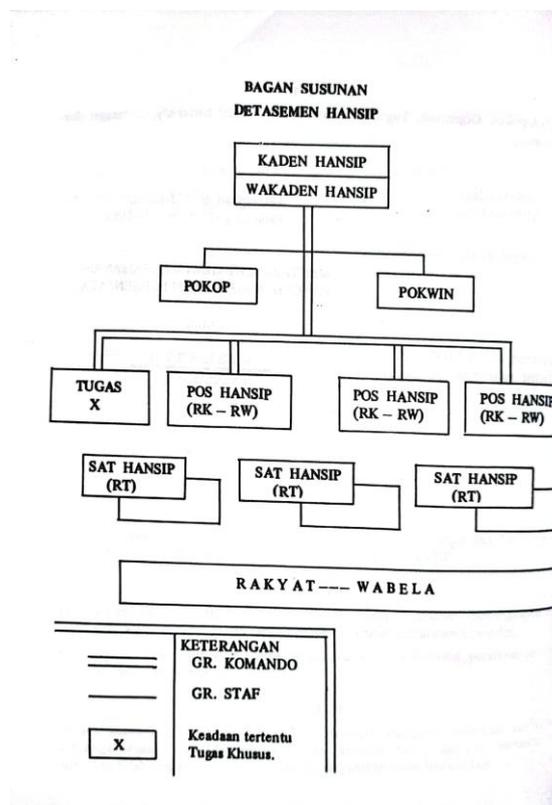
Bagan 4. Susunan MASEKHANSIP
(Sumber : Partisipasi Rakyat Dalam Usaha Pembelaan
Negara, 1972)

e. Markas Datasemen

Markas Datasemen hansip merupakan komando Hansip yang terendah meliputi desa, dipimpin oleh sorang Kepala Datasemen Hansip yang menjabat sebagai Lurah/Kepala Desa. Kepala Datasemen Hansip membawa pos-pos Hansip yang berkedudukan di Rukun Warga (RW) dan sebagai koordinator satuan-satuan Hansip yang berada di Rukun Tetangga (RT) tugasnya pembinaan dan pengendalian sesuai petunjuk dan perintah KAMASEKHANSIP pada Perlawanan Rakyat, Perlindungan Masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Markas Datasemen dibantu oleh:

1. Wakil Kepala Markas Datasemen Hansip tugasnya membantu dan memberikan nasehat kepada Kepala Datasemen Hansip.
2. Kelompok Komando yang terdiri atas Kelompok Operasi (POKOP) dan Kelompok Administrasi (POKMIN).
3. Pos-pos Hansip tugasnya membantu pengkoordinasian dan pembinaan satuan Hansip dalam lingkungan Rukun Warga (RW)
4. Satuan-satuan Hansip, terdiri dari regu-regu cadangan Pertahanan Sipil di lingkungan Rukun Tetangga (RT) yang disusun dari anggota masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, berikut bagan susunan Markas Datasemen Hansip :

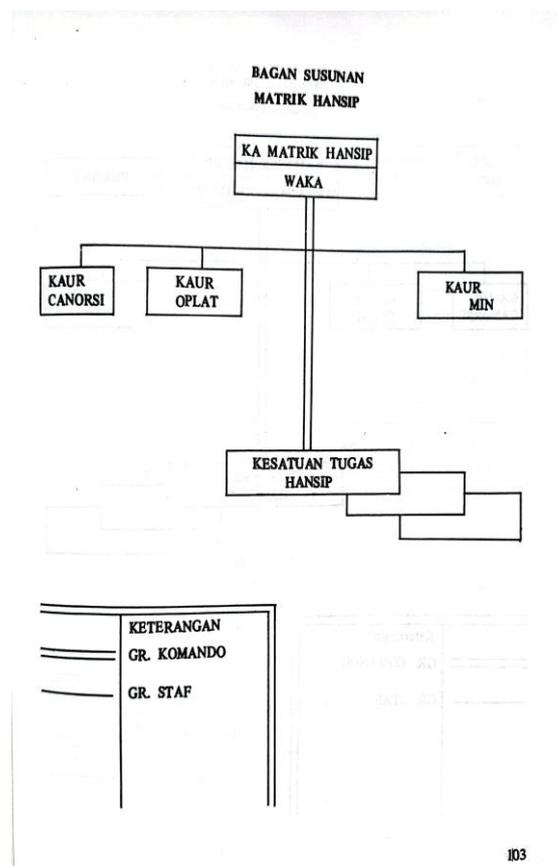


Bagan 5. Susunan DENHANSIP
(Sumber : Partisipasi Rakyat Dalam Usaha Pembelaan
Negara, 1972)

f. Markas Distrik

Markas Distrik merupakan komando Hansip pada daerah/proyek vital. Kedudukan dan tingkatan dari Markas Distrik disesuaikan dengan tingkat kevitalan proyek. Dipimpin oleh Kepala Markas Distrik dengan dibantu oleh beberapa kelompok staf yang dipimpin oleh Kepala Staf. Kesatuan tugas dari Markas Distrik Hansip adalah merupakan kesatuan inti yang mempunyai tugas dalam perlindungan dan keamanan proyek-proyek khusus.

Untuk lebih memperjelas mengenai susunan organisasi Markas Distrik Hansip, berikut bagan susunan dari Markas Distrik Hansip :



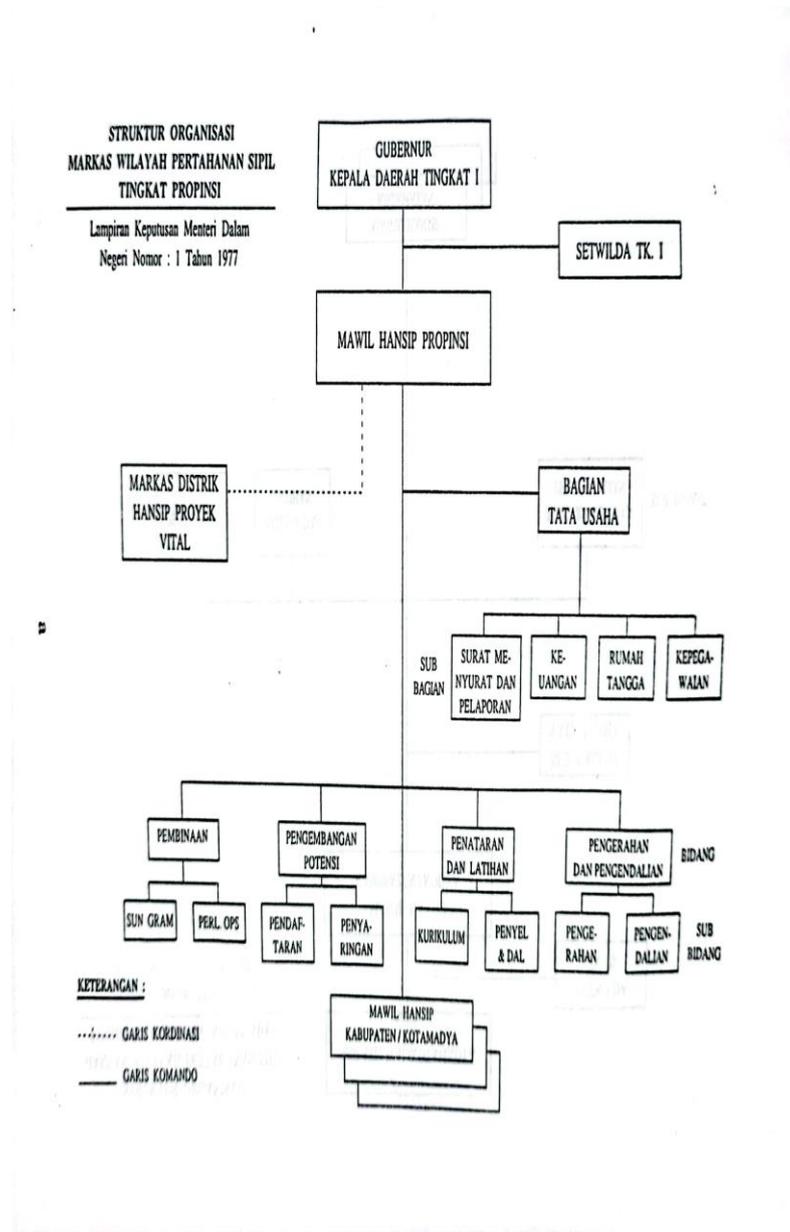
Bagan 6. Susunan MATRIHANSIP
(Sumber : Partisipasi Rakyat Dalam Usaha Pembelaan
Negara, 1972)

Susunan organisasi Pertahanan Sipil dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Organisasi Pertahanan sipil di daerah. susunan Organisasi Hansip seteleah pelimpahan pembinaan dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri, dilakukan penyempurnaan susunan organisasi Pertahanan Sipil. Susunan Organisasi Pertahanan Sipil mengalami beberapa perubahan dari sebelumnya, Markas Besar Pertahanan Sipil ditiadakan. Penyebutan Markas-markas Pertahanan Sipil cukup berbeda dari sebelumnya namun dalam pelaksanaan teknisnya sama seperti sebelumnya.. Susunan organisasi Pertahanan Sipil setelah beralih dibawah pembinaan Departemen dalam negeri secara hierarkhis diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977²⁵ yang terdiri dari terdiri dari :

a. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Provinsi

Markas Wilayah Pertahanan Sipil Provinsi memiliki tugas dalam membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pertahanan sipil di Daerah Tingkat I sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dari pertahanan sipil di Daerah Tingkat I dibuat bidang atau bagian khusus seperti : Bagian Tata Usaha, Bidang Pembinaan, Bidang Pengembangan Potensi, Bidang Penataran dan Latihan, Bidang Pengerahan dan pengendalian. Dalam bagian atau bidang tersebut dibagi kembali dalam sub bagian dan sub bidang untuk membantu bagian atau bidang dalam memudahkan pelaksanaan fungsi dan tugas.

²⁵ *Buku Himpunan Peraturan Pertahanan Sipil*, hlm. 196.

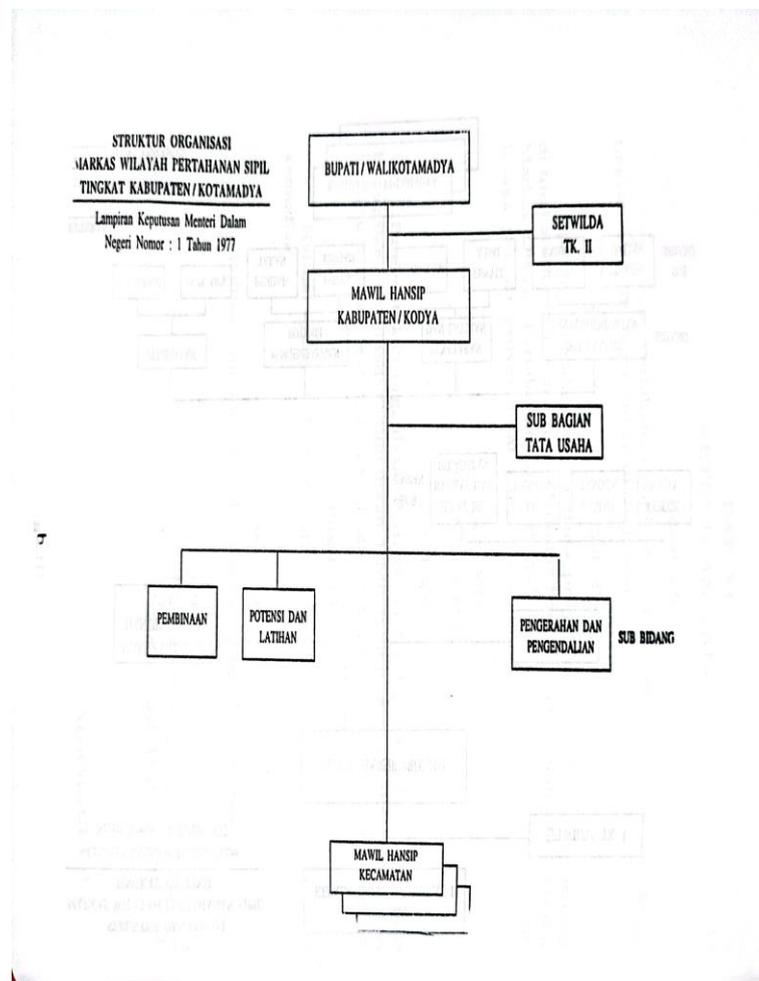


Bagan 7. Susunan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Provinsi
(Sumber : 20 Tahun Pertahanan Sipil, 1982)

b. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten/Kotamadya

Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten/Kotamadya memiliki tugas dalam membantu Bupati/Walikota Daerah Tingkat II dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi pertahanan sipil di Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dari pertahanan sipil di Daerah Tingkat II dibuat Sub Bidang atau Sub Bagian khusus seperti: Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bidang Pembinaan, Sub Bidang Potensi dan Latihan, Sub bidang Pengerahan dan Pengendalian. Untuk lebih jelasnya berikut susunan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten/Kotamadya :

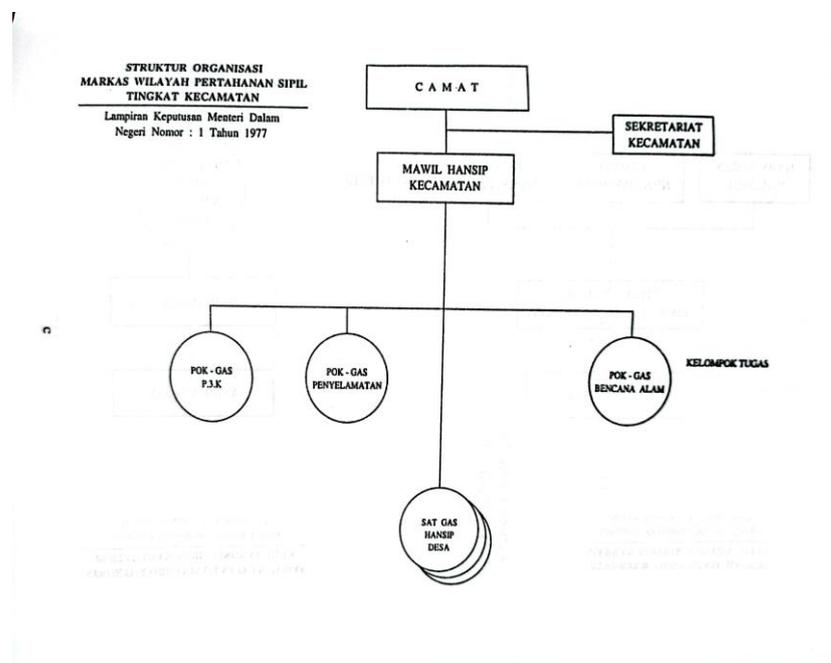


Bagan 8. Susunan Markas Wilayah Pertahanan Sipil
Kabupaten/Kotamadya

(Sumber : 20 Tahun Pertahanan Sipil, 1982)

c. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan

Markas Wilayah Pertahanan Sipil di Kecamatan memiliki tugas untuk membantu Camat Kepala Wilayah dalam mempersiapkan dan mengerahkan serta mengendalikan potensi rakyat dalam bidang pertahanan sipil. Selanjutnya melaksanakan operasi-operasi dalam rangka penanggulangan segala bencana baik alam maupun manusia sesuai dengan tugas dan fungsi pertahanan sipil. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dari pertahanan sipil Di Markas Wilayah Kecamatan dibentuk kelompok tugas seperti: kelompok tugas pertolongan pertama pada kecelakaan, kelompok tugas penyelamatan, kelompok tugas bencana alam. Untuk lebih jelasnya berikut susunan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan



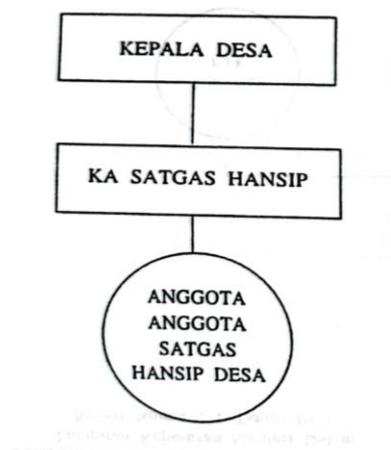
Bagan 9. Susunan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan

(Sumber : 20 Tahun Pertahanan Sipil, 1982)

d. Satuan Tugas Pertahanan Sipil Desa

Satuan tugas pertahanan sipil desa memiliki tugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban desa, menyusun potensi Pertahanan Sipil dalam satuan tugas Pertahanan Sipil Desas, dan membantu Kepala Desa untuk mengerahkan potensi pertahanan sipil dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Desa yang bersangkutan.. Satuan tugas Pertahanan Sipil Desa terdiri dari anggota-anggota satuan tugas yang berasal dari rakyat terlatih dan dikepalai oleh Kepala Satuan Tugas Desa yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Berikut susunan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Desa/Distrik

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS
PERTAHANAN SIPIL TINGKAT DESA**
Lampiran Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 1 Tahun 1977



Bagan 10. Susunan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Desa/Distrik
(Sumber : 20 Tahun Pertahanan Sipil, 1982)

2.4 Pakaian Seragam dan Atribut Hansip

Pakaian seragam dan atribut dalam sebuah organisasi merupakan suatu usaha dalam peningkatan gairah serta prestasi kerja. Selain itu, seragam dan atribut berguna untuk meningkatkan citra serta kewibawaan sebuah organisasi. Departemen Pertahanan Keamanan mengeluarkan surat keputusan yang berisikan peraturan pakaian seragam untuk organisasi Pertahanan Sipil dalam rangka pelaksanaan konsolidasi terutama dibidang personil dengan tujuan untuk mentertibkan penggunaan kelengkapan personil mengenai pakaian kerja.

Pakaian seragam Hansip identik dengan warna hijau, namun pada awalnya pakaian seragam Hansip didominasi dengan warna coklat tua. Penggunaan seragam dan atribut organisasi pertahanan sipil dibawah naungan Departemen Pertahanan Keamanan diatur dalam Surat Keputusan No. KEP / III /I/ 1968²⁶. Hansip dalam pelaksanaan tugasnya memiliki 3 jenis pakaian. Berikut jenis serta aturan pakaian seragam dan atribut Hansip :

a. Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pakaian Dinas Harian memiliki ketentuan seperti, Peci dari kain drill berwarna coklat tua, kemeja lengan Panjang dari kain drill berwarna coklat tua, celana Panjang dengan kain yang sama untuk pria sedangkan Wanita menggunakan rok, ikat pinggang kanvas berwarna hitam, sepatu rendah dari kulit berwarna hitam untuk pria sedangkan untuk wanita sepatu tumit rendah berbahan yang sama, kaos kaki berwarna hitam.

²⁶ Tim Penerbit Buku 20 Tahun Pertahanan Sipil. *op. cit*, hlm. 163.

b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pakaian Dinas Lapangan memiliki ketentuan seperti peci lapangan bahan drill warna coklat tua, kemeja yang sama dengan PDH, celana panjang yang sama dengan PDH, Ikat pinggang yang sama dengan PDH, sabuk besar 5cm dari bahan kanvas warna hitam, sepatu tinggi dari kulit warna hitam, kaos kaki sama dengan PDH. Untuk membedakan PDL pria dengan Wanita adalah PDH Wanita menggunakan rok serta sepatu yang sama dengan ketentuan PDH.

c. Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pakaian Dinas Upacara sama dengan ketentuan dari PDH. Namun, untuk petugas Wanita memakaai jas buka lengan panjang dengan menggunakan kemeja warna putih.

Pelimpahan pembinaan, Pertahanan Sipil dibawah naungan Departemen Dalam Negeri mengubah penggunaan seragam dan atribut organisasi pertahanan sipil. Warna pakaian seragam pun yang awalnya didominasi oleh warna coklat tua diubah menjadi warna hijau tua. Selain itu bertamah 2 jenis pakaian dinas. Penggunaan pakaian seragam dan atribut Pertahanan Sipil diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 1979²⁷ .:

a. Pakaian Seragam Harian (P.S.H)

Digunakan untuk melakukan tugas pekerjaan sehari hari dengan dilengkapi atribut seperti: topi berwarna hijau muda, ikat pinggang

²⁷ Keputusan Menteri Dalam Negeri. *Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil*. 1979. Diakses pada 16 Maret 2022 <https://satlinmas.simasjateng.id>

berwarna hitam, kemeja lengan pendek berwarna hijau muda, celana untuk pria dan rok untuk wanita, sepatu rendah dari kulit yang bertasi untuk pria dan tidak bertali untuk wanita.

b. Pakaian Seragam Lapangan (P.S.L)

Digunakan pada waktu melaksanakan tugas operasi di lapangan dengan dilengkapi atribut seperti: topi berwarna hijau muda, kemeja lengan Panjang, celana Panjang dengan banyak saku, ikat pinggang besar, dan sepatu boot berwarna hitam. Dalam penggunaan pakaian seragam lapangan untuk Wanita sama dengan pria.

c. Pakaian Seragam Upacara (P.S.U)

Digunakan pada waktu mengikuti upacara-upacara resmi. Untuk ketentuan seragam serta atributnya sama dengan pakaian seragam harian namun yang membedakannya adalah penggunaan peci bivak warna hijau muda serta pria menggunakan dasi hitam dan Wanita jas buka berwarna hijau muda lengan pendek.

d. Pakaian Seragam Upacara Pembina (P.S.U.P)

Digunakan khusus untuk para Pembina pada waktu mengikuti upacara khusus. Untuk ketentuan seragam serta atributnya sama dengan pakaian seragam harian namun yang membedakannya adalah penggunaan topi pet hijau muda dan jas lengan pendek untuk pria sedangkan peci berbentuk bundar berwarna hijau muda dan jas buka Wanita berlengan pendek.

e. Pakaian Seragam Pembantu Petugas Lalu Lintas (P.S.P.P.L)

Digunakan pada waktu membantu menfatur lalu lintas di jalan raya.

Pelengkap atribut untuk pria sama dengan Pakaian Seragam Lapangan namun bedanya menggunakan topi lapangan berwarna putih, selempang silang Pundak berwarna putih, sabuk besar berwarna putih, dan sepatu boot. Untuk Wanita atribut yang dipakai saman dengan tanpa sepatu boot namun menggunakan pakaian seragam harian.

